

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian tinjauan pustaka akan memuat hasil penelitian terdahulu dan konsep atau teori yang berhubungan dengan fokus penelitian, berikut lima penelitian dengan tingkat kesamaan yang cukup tinggi, namun tetap terdapat perbedaan baik dari konsep, teori, ataupun studi empiris;

Climate Change Acts in Scotland, Austria, Denmark, and Sweden: The Role of Discourse and Deliberation oleh Sarah Louise Nash dan Reinhard Steurer merupakan publikasi di *Journal Climate Policy* pada 11 Agustus 2021. Jurnal ini membahas bagaimana proses legislatif di balik kebijakan iklim dari keempat negara tersebut. Pada bagian Denmark, penulis artikel ini menyoroti bagaimana dinamika pembentukan kebijakan iklim pada tahun 2014 dan 2020 dengan menekankan peran deliberasi dalam pembentukannya. Permasalahan utamanya adalah bagaimana kebijakan iklim tahun 2014 tidak mengedepankan inklusivitas dan tidak mampu memanfaatkan momentum pasca COP15 di Copenhagen. Hal ini yang kemudian coba diatasi pada pembaharuan kebijakan iklim pada tahun 2020.

Penelitian ini memiliki persamaan yang cukup tinggi baik dari konsep demokrasi deliberasi, maupun dinamika pembentukan kebijakan iklim di Denmark. Namun, tidak mengaitkannya pada rezim internasional maupun menggunakan teori kepatuhan rezim untuk melihat fenomena kepatuhan Denmark terhadap *Paris Agreement*.

Denmark: A Case Study for a Climate-Neutral Europe oleh Thibault Menu merupakan publikasi *The French Institute of International Relations* pada 19 April 2021. Tulisan ini mengeksplorasi secara mendalam terkait upaya Denmark dalam mengatasi perubahan iklim mulai dari pencapaian dalam sektor transisi energi, ambisi dekarbonisasi, inovasi kebijakan iklim, maupun harapan dan hambatan yang muncul dalam upaya Denmark mengatasi permasalahan lingkungan global.

Tulisan ini memiliki persamaan yang cukup tinggi dari segi fenomena empiris yang ditetapkan. Namun, apabila dilihat lebih jauh, tulisan tersebut tidak

mengkaji lebih jauh tentang peran dari rezim lingkungan internasional seperti *Paris Agreement* dan tidak secara spesifik menggunakan teori kepatuhan rezim.

Fighting Against Climate Change: Denmark's Effort in Reducing Global Carbon Emissions oleh Lintang Sumunaring Tyas dan Havidz Ageng Prakoso merupakan publikasi di *Insignia Journal of International Relations* pada 2 November 2022. Jurnal ini membahas tentang upaya-upaya Denmark dalam mengurangi karbon emisi global. Para penulis jurnal ini mengeksplorasi upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Denmark dalam mengatasi isu tersebut, seperti melalui inovasi kebijakan domestik, upaya bilateral melalui *Green Frontline Mission*, sampai memanfaatkan kepemimpinan pada COP26 untuk membentuk kerjasama *Beyond Oil & Gas Alliance* atau BOGA.

Meskipun terdapat persamaan pada studi fenomena yang diangkat seperti inovasi kebijakan iklim Denmark, penelitian ini lebih menekankan pada diplomasi hijau serta manfaat ekonomi melalui energi terbarukannya dan sama sekali tidak dikaitkan dengan teori kepatuhan rezim.

Green Frontrunner or Indebted Culprit? Assessing Denmark's Climate Targets in Light of Fair Contributions Under the Paris Agreement oleh Joachim Peter Tilsted dan Anders Bjørn merupakan publikasi di *Climatic Change* pada 20 Juli 2023. Tulisan ini berkontribusi pada perdebatan akademis dan kebijakan tentang kepemimpinan iklim dengan mengilustrasikan pendekatan untuk mengkaji target pengurangan emisi nasional yang berfokus pada Denmark. Para penulis menyoroti Denmark yang dikenal luas sebagai pemimpin iklim, dihargai karena rekam jejak historisnya dan target iklimnya saat ini.

Terdapat persamaan yang cukup tinggi pada bagaimana penulis mengaitkan fenomena yang ada dengan konsep rezim internasional. Meskipun demikian, nampaknya para penulis lebih berfokus menantang narasi *green frontrunner* dengan menunjukkan adanya ketidakadilan emisi historis Denmark dan komitmennya yang tidak memadai. Tidak terdapat kaitan langsung dengan teori kepatuhan rezim.

The New Era of Climate Law in Denmark and in the EU oleh Christina Tvarnø merupakan publikasi ilmiah di *European Public Law* pada tahun 2022.

Karya ini menganalisis kebijakan iklim Denmark dengan peraturan hukum iklim Uni Eropa secara komparatif serta mengkaji keselarasannya dengan *Paris Agreement*. Meskipun terdapat perbedaan, Penulis menganggap kedua kerangka legislatif tersebut bertujuan untuk memenuhi target dari *Paris Agreement*.

Terdapat persamaan pada bagaimana fenomena yang diangkat melalui kebijakan iklim dikaitkan langsung dengan target dari rezim internasional. Namun apabila dilihat secara menyeluruh, tulisan tersebut tidak mengeksplorasi proses konstruksi sosial maupun keterkaitannya dengan perilaku kepatuhan negara terhadap rezim internasional.

Sebagai upaya memperkuat kebaruan dari penelitian terdahulu, penelitian ini menggunakan 22 pembandingan yang tercantum pada tabel berikut:

No	Literatur	Penulis	Teori/konsep	Bahasan
1	Climate Politics in Small European States	Neil Carter, Conor Little & Diarmuid Torney (2019)	<i>Theory of Small States</i> oleh Peter Katzenstein	Tulisan ini mengeksplorasi dinamika pembuatan kebijakan iklim di negara-negara kecil yang mana berkontribusi kurang dari 0,5% terhadap pengeluaran emisi gas rumah kaca global. Negara-negara kecil sering kali menganggap diri mereka sebagai " <i>drop in the ocean</i> " dalam hal emisi global, yang menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab

				<p>mereka untuk memimpin kebijakan iklim. Penulis berasumsi, meskipun ukurannya kecil, negara-negara ini dapat memiliki pengaruh yang sangat besar melalui inovasi.</p> <p>Tidak seperti beberapa negara kecil lainnya dengan politik yang juga didorong oleh konsensus, Denmark menunjukkan adanya polarisasi dalam kebijakan iklim, yang dipengaruhi oleh persaingan partai dan opini publik (seperti Irlandia). Denmark juga terkenal dengan penerapan pajak karbon sejak dini, yang difasilitasi oleh sistem pemilihan proporsional yang mencakup <i>environment-oriented</i></p>
--	--	--	--	---

				<i>party (Carter et al., 2019).</i>
2	Climate Change Acts in Scotland, Austria, Denmark, and Sweden: The Role of Discourse and Deliberation	Sarah Louise Nash & Reinhard Steurer (2021)	<p>Analisis kebijakan <i>discursive and deliberative</i>, menekankan perubahan iklim sebagai fenomena yang dikonstruksi secara sosial dan dipengaruhi oleh konteks sosial, sejarah, serta politik.</p> <p><i>Deliberative Democracy:</i> Menyoroti pentingnya dialog yang inklusif, terinformasi, dan berulang dalam proses legislatif.</p>	<p>Tulisan ini meneliti proses legislatif di balik <i>Climate Change Acts</i> (CCA) dari keempat negara tersebut. Penulis mencoba melihat bagaimana wacana dan musyawarah memengaruhi ambisi legislasi iklim, dengan fokus pada target pengurangan emisi <i>greenhouse gas</i> (GHG). Melalui analisis dokumen yang ekstensif dan wawancara dengan para pembuat kebijakan, penulis mengidentifikasi interaksi antara wacana iklim publik, musyawarah parlemen, dan hasil legislatif.</p> <p>Kebijakan iklim atau <i>Climate Change Acts</i> (CCA) yang ambisius</p>

				<p>lebih mungkin terjadi ketika wacana global mempolitisasi kebijakan iklim, dan proses parlementer yang mendorong adanya musyawarah.</p> <p>CCA Denmark 2014 Dikritik karena kurangnya target pengurangan gas rumah kaca yang terukur, yang disebabkan oleh negosiasi tertutup dan kurangnya momentum politik pasca <i>Copenhagen Summit</i> (COP 15 pada tahun 2009).</p> <p>CCA Denmark 2020 Menandai titik balik dengan dimasukkannya proposal yang digerakkan oleh warga negara, dukungan publik dan lintas partai yang luas, serta target yang ambisius (<i>Net-zero</i></p>
--	--	--	--	--

				<p>pada tahun 2050, dengan pengurangan 70% emisi pada tahun 2030). Hal ini juga dipengaruhi oleh <i>Paris Agreement</i> dan gerakan <i>grassroots</i> seperti <i>Fridays for Future</i>. Proses pembentukannya juga beralih dari musyawarah tertutup pada tahun 2014 ke pemanfaatan partisipasi publik dan perangkat demokrasi deliberatif pada tahun 2020. Kemajuan Denmark antara tahun 2014 dan 2020 menggambarkan potensi transformatif dari keterlibatan publik dan tata kelola yang responsif. CCA Denmark tahun 2020, yang dibentuk oleh partisipasi publik dan tata kelola yang responsif, merupakan contoh bagaimana wacana dan</p>
--	--	--	--	--

				musyawarah dapat menghasilkan kemajuan kebijakan yang substansial (Nash & Steurer, 2021).
3	Denmark: A Case Study for A Climate-neutral Europe	Thibault Menu (2021)	<p><i>Constructivism:</i> Peran Denmark dalam membentuk norma iklim menggambarkan bagaimana faktor ideasional dan kepemimpinan normatif memengaruhi tata kelola global.</p> <p><i>Liberal Institutionalism:</i> Pendekatan kolaboratif yang digunakan Denmark melalui mekanisme UE, perjanjian bilateral, dan kemitraan publik-swasta menunjukkan</p>	<p>Meneliti upaya dekarbonisasi, pencapaian, dan tantangan Denmark sebagai model bagi negara lain dalam mengejar netralitas iklim. Tulisan ini menyoroti posisi Denmark sebagai pemimpin dalam perubahan iklim, sekaligus mengakui keterbatasan kontekstual dan tantangan dalam mereplikasi strateginya di negara lain.</p> <p>Dengan menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 70% pada tahun 2030, Denmark melampaui target Uni</p>

			<p>pentingnya lembaga dan kerja sama dalam menangani isu global seperti perubahan iklim.</p>	<p>Eropa, sehingga memperkuat ambisi Uni Eropa untuk menjadi benua pertama di dunia yang netral terhadap iklim (berdasarkan <i>European Green Deal</i>)</p> <p>Transisi energi dan proyek-proyek inovatifnya seperti pulau energi dan hidrogen hijau bertindak sebagai pola bagi negara-negara yang ingin menyelaraskan diri dengan <i>Paris Agreement</i>. Transisi energi Denmark merupakan studi kasus menarik yang menggambarkan interaksi antara kebijakan lingkungan, strategi geopolitik, dan kerja sama internasional. Penulis di sini menawarkan analisis tentang</p>
--	--	--	--	--

				pemanfaatan diplomasi negara-negara kecil, menavigasi kerangka tata kelola global, dan mengatasi tantangan yang saling terkait dari perubahan iklim dan <i>energy security</i> (Menu, 2021).
4	Fighting Against Climate Change: Denmark's Effort in Reducing Global Carbon Emissions	Lintang Sumunaring Tyas & Havidz Ageng Prakoso (2022)	<i>Green Diplomacy</i> atau Diplomasi hijau disajikan sebagai kerangka kerja yang mendorong kerja sama internasional dalam isu lingkungan melalui keterlibatan bilateral, regional, dan global. Strategi Denmark menggambarkan diplomasi ini dengan menyelaraskan kepentingan nasional dengan	Jurnal ini menguraikan pendekatan dan strategi inovatif Denmark dalam memerangi perubahan iklim di tingkat domestik, regional, dan internasional, dengan memanfaatkan kerangka <i>green diplomacy</i> . Denmark telah berhasil mengurangi emisi karbon nasional, khususnya mencapai pengurangan sebesar 28% dari tahun 2005 hingga 2018, melampaui rata-rata Uni Eropa sebesar

			<p>prioritas global, mendorong keberlanjutan, dan menumbuhkan tanggung jawab bersama di antara negara-negara.</p>	<p>16,2%. Inovasi kebijakan domestik seperti <i>Danish Climate Act</i> (2014, diperbarui pada tahun 2020) berkomitmen untuk mengurangi emisi sebesar 70% pada tahun 2030 dan netralitas karbon penuh pada tahun 2050.</p> <p>Upaya bilateral melalui program <i>Green Frontline Mission</i> serta kepemimpinan Denmark dalam COP26 dan <i>Beyond Oil & Gas Alliance</i> atau BOGA mencerminkan komitmennya terhadap tata kelola iklim global, namun juga menggaris-bawahi perdebatan mengenai apakah negara-negara kecil dapat mempertahankan</p>
--	--	--	---	---

				<p>pengaruh jangka panjang terhadap penghasil emisi yang lebih besar.</p> <p>Diplomasi hijau dikaitkan dengan manfaat ekonomi, dengan Denmark memanfaatkan teknologi energi terbarukannya (misalnya, turbin angin) untuk pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2019, ekspor teknologi energi hijau menyumbang EUR 8,9 miliar bagi ekonomi Denmark (Tyas & Prakoso, 2022).</p>
5	<p>Green Frontrunner or Indebted Culprit? Assessing Denmark's Climate Targets in Light of Fair Contributions</p>	<p>Joachim Peter Tilsted & Anders Bjørn (2023)</p>	<p><i>Distributive climate justice:</i> adalah gagasan bahwa mereka yang menghasilkan emisi paling banyak harus membayar paling</p>	<p>Tulisan ini mengevaluasi secara kritis narasi kepemimpinan iklim Denmark. Analisis ini mempertanyakan apakah target iklim Denmark, termasuk pengurangan emisi sebesar 70% pada</p>

	<p>Under the Paris Agreement</p>		<p>banyak untuk perubahan iklim.</p> <p><i>Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC):</i></p> <p>Ditemukan dalam kerangka kerja iklim internasional, prinsip ini menganjurkan agar kewajiban mitigasi negara-negara harus selaras dengan emisi historis dan kapasitas mereka saat ini.</p> <p>Kerangka kerja berbasis ekuitas seperti tanggung jawab (<i>polluter-pays</i>), kapasitas (tanggung jawab mitigasi berbasis kekayaan), dan kebutuhan</p>	<p>tahun 2030, sejalan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan distributif berdasarkan <i>Paris Agreement</i>. Penulis melihat perubahan narasi kebijakan iklim Denmark dari "<i>green frontrunner</i>" menjadi "<i>indebted culprit</i>" dalam hal tindakan iklim yang adil.</p> <p>Penulis menggarisbawahi perlunya pendekatan keadilan transformatif untuk mengatasi emisi historis, keadilan global, dan kewajiban moral dalam tata kelola iklim</p> <p>Denmark sering digambarkan sebagai "<i>green frontrunner</i>" dalam pemeringkatan global. Studi ini menantang narasi tersebut dengan</p>
--	----------------------------------	--	--	---

			<p>(memprioritaskan emisi yang diperlukan untuk kebutuhan dasar manusia) diterapkan untuk mengevaluasi target Denmark.</p>	<p>menunjukkan bahwa penggambaran ini mengabaikan ketidakadilan emisi historisnya dan komitmen yang tidak memadai berdasarkan penilaian berbasis ekuitas. Penyusunan target iklim Denmark yang selaras dengan <i>Paris Agreement</i> menimbulkan pertanyaan etika tentang penggunaan metrik yang selektif dan pengabaian prinsip keadilan distributif. Jalur berbasis ekuitas yang mensyaratkan pengurangan cepat atau emisi negatif dipandang tidak layak. Namun, analisis tersebut berpendapat bahwa mengakui kesenjangan ini sangat penting untuk tata kelola iklim global yang adil.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Terdapat ketegangan antara status Denmark sebagai negara kaya dengan emisi historis yang tinggi dan klaim kepemimpinan iklimnya, terutama mengingat ketergantungannya pada penghitungan emisi teritorial. Tulisan ini menyoroti implikasi yang lebih luas untuk peringkat iklim internasional dan peran negara-negara berpenghasilan tinggi dalam menetapkan preseden untuk kontribusi yang adil (Tilsted & Bjørn, 2023).</p>
6	<p>Political Myths in Climate Leadership: The Case of Danish Climate and</p>	<p>Helene Dyrhaug (2021)</p>	<p><i>Political Myth:</i> Berasal dari narasi keberhasilan di masa lalu, mitos politik melegitimasi</p>	<p>Tulisan ini mengeksplorasi bagaimana narasi tentang kepemimpinan iklim dan energi Denmark berkembang menjadi</p>

<p>Energy Pioneership</p>		<p>arah kebijakan saat ini. Di Denmark, mitos politik tentang kepeloporan iklim digunakan oleh pemerintah untuk memvalidasi posisi kepemimpinan mereka, tetapi dapat ditafsirkan ulang berdasarkan prioritas politik.</p> <p><i>Climate leadership framework:</i></p> <p><i>Pusher:</i> Ambisi domestik dan internasional yang tinggi (era Thorning-Schmidt).</p> <p><i>Symbolic Leader:</i> Fokus pada pasar internasional</p>	<p>mitos politik, yang memengaruhi kepemimpinan dan kebijakan iklimnya. Penulis menganalisis penafsiran ulang mitos ini di bawah berbagai pemerintahan dan menilai implikasinya terhadap posisi kepemimpinan domestik dan internasional Denmark.</p> <p>Mitos tentang kepeloporan iklim dan energi Denmark bermula pada tahun 1970-an dan dilembagakan pada tahun 1990-an. Seiring berjalannya waktu, mitos ini telah ditafsirkan ulang, dengan lebih berfokus pada teknologi energi hijau dan kebijakan industri daripada perlindungan lingkungan.</p>
-------------------------------	--	---	---

			<p>dengan ambisi domestik yang lemah (era Løkke Rasmussen).</p> <p><i>Laggard:</i> Ambisi rendah di kedua bidang (tidak berlaku dalam analisis ini).</p> <p><i>Polycentric Governance:</i> Mengakui interaksi dimensi domestik dan internasional dalam kepemimpinan iklim, di mana kebijakan industri dan strategi pasar berkontribusi pada pengakuan eksternal.</p>	<p>Pemerintahan Thorning-Schmidt (2011-2015) mempromosikan strategi pertumbuhan hijau, mengintegrasikan kebijakan iklim domestik dan internasional yang ambisius dengan ekspor teknologi energi hijau, memposisikan Denmark sebagai "<i>pusher</i>".</p> <p>Pemerintahan Løkke Rasmussen (2015-2019) mengadopsi realisme hijau, memprioritaskan daya saing industri, mengurangi ambisi domestik, dan meningkatkan strategi berorientasi pasar, yang mengarah ke posisi "<i>symbolic leader</i>".</p>
--	--	--	--	--

				<p>Fokus pada ekspor teknologi energi hijau menciptakan dilema di mana kebijakan ekonomi sering kali <i>overshadowed</i> komitmen iklim yang ambisius.</p> <p>Menyeimbangkan kebijakan iklim domestik yang ambisius dengan strategi berorientasi pasar untuk ekspor teknologi energi hijau menghadirkan ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan komitmen iklim (Dyrhaug, 2021).</p>
7	<p>Routes to Credible Climate Commitment: The UK and Denmark Compared</p>	<p>Matthew Lockwood (2021)</p>	<p><i>Comparative political institutions:</i></p> <p>Penelitian ini mengambil literatur politik komparatif untuk menjelaskan bagaimana sistem elektoral membentuk</p>	<p>Tulisan ini meneliti bagaimana sistem politik yang berbeda memengaruhi jalur untuk mencapai komitmen kebijakan iklim yang kredibel. Analisis ini membandingkan ketergantungan Inggris pada undang-</p>

			<p>pembuatan kebijakan dan mekanisme komitmen.</p> <p>Kalau melihat dari sudut pandang konstruktivisme, Pendekatan Denmark yang berdasarkan konsensus bersumber dari norma budaya kerja sama, sedangkan Inggris mencerminkan budaya politik yang lebih konfrontatif.</p>	<p>undang dan pendelegasian kepada <i>independent technocratic bodies</i> dengan pendekatan Denmark berupa perjanjian dan undang-undang multipihak yang dinegosiasikan</p> <p><i>Legislation and delegation (UK):</i> Berakar pada sistem politik mayoritas, yang dicontohkan oleh <i>Climate Change Act (CCA)</i> tahun 2008. Menggunakan <i>Committee on Climate Change (CCC)</i> sebagai mekanisme penasihat dan akuntabilitas. Model ini sejalan dengan logika politik Inggris di mana perjanjian lintas partai jangka panjang kurang memungkinkan.</p>
--	--	--	--	---

				<p><i>Negotiated Agreements</i> (Denmark): Mencerminkan sistem perwakilan proporsional di mana konsensus politik sangat penting. Menggabungkan perjanjian formal antara partai dan undang-undang untuk membangun kredibilitas. Perjanjian, seperti Perjanjian Energi 2012 dan 2018, melibatkan mayoritas partai politik dan menyediakan kerangka kerja untuk undang-undang berikutnya.</p> <p>Kedua sistem tersebut secara efektif mendorong komitmen iklim yang kredibel. Model Inggris berjuang dengan konflik internal yang diselesaikan melalui</p>
--	--	--	--	---

				<p>proses politik informal. (Ini mempertanyakan daya tahan mekanisme komitmen ala Inggris di tengah meningkatnya tuntutan publik dan politik akan inklusivitas dan legitimasi.) (Lockwood, 2021).</p>
8	<p>The New Era of Climate Law in Denmark and in the EU</p>	<p>Christina D. Tvarnø (2022)</p>	<p><i>International Climate Law:</i> Terutama berasal dari <i>Paris Agreement</i> dan kerangka kerja sebelumnya seperti <i>Kyoto Protocol</i>, hukum ini sejalan dengan penekanan internasional pada aturan iklim yang mengikat di tingkat nasional.</p>	<p>Artikel ini memberikan analisis hukum komparatif tentang <i>Danish Climate Act</i> tahun 2020 dan Peraturan Hukum Iklim Uni Eropa tahun 2021, yang mengkaji keselarasannya dengan hukum iklim internasional, khususnya <i>Paris Agreement</i>. Penulis menyoroti bagaimana undang-undang ini mewakili model legislatif baru yang berfokus pada pencapaian netralitas</p>

				<p>iklim melalui target yang mengikat secara hukum, meskipun undang-undang ini terutama berfungsi sebagai undang-undang umum tanpa aturan substantif yang terperinci.</p> <p><i>Danish Climate Act</i></p> <p>Memperkenalkan sasaran yang mengikat secara hukum, seperti pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 70% pada tahun 2030 (dibandingkan dengan tingkat tahun 1990) dan netralitas iklim pada tahun 2050.</p> <p>Target yang mengikat diadopsi secara serupa, termasuk setidaknya pengurangan emisi sebesar 55% pada tahun 2030 dan emisi nol bersih pada tahun 2050.</p>
--	--	--	--	--

				<p>Kedua kerangka legislatif tersebut bertujuan untuk memenuhi target suhu global yang ditetapkan oleh <i>Paris Agreement</i>, khususnya membatasi pemanasan hingga 1,5°C. Denmark telah memulai perubahan substansial, seperti mengakhiri produksi minyak dan gas di laut utara pada tahun 2050 dan menciptakan pulau-pulau energi. Sementara Uni Eropa menekankan pendekatan sistemik, mekanisme konsultasi ilmiah, dan penilaian berkala (TvarnØ, 2022).</p>
9	Towards Net Zero Emissions in Denmark	Andrew Barker, Hélène Blake, Filippo Maria	<i>Porter's Hypothesis:</i> Menyatakan bahwa kebijakan lingkungan yang ketat dapat	Dokumen ini mengkaji target iklim ambisius Denmark, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca

		<p>D’Arcangelo, & Patrick Lenain (2022)</p>	<p>memacu inovasi dan produktivitas, sehingga memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif.</p> <p>Hal ini lebih menekankan pada kerangka teknis terkait perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh Denmark dalam mencapai targetnya mencapai <i>net-zero</i> pada 2050.</p>	<p>sebesar 70% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tahun 1990 dan pencapaian netralitas karbon pada tahun 2050. Para penulis menganalisis dampak sosial-ekonomi, strategi khusus sektor, dan instrumen kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Kepemimpinan Denmark dalam mengurangi emisi ditekankan, di samping tantangan transisi yang cepat, terutama di bidang pertanian, transportasi, dan energi.</p> <p>Denmark telah mengurangi emisi sebesar 36% dari tingkat tahun 1990 pada tahun 2019. Kemajuan signifikan juga telah dicapai di</p>
--	--	---	---	--

				<p>sektor energi melalui adopsi energi terbarukan, khususnya tenaga angin.</p> <p>Tulisan ini menekankan kepemimpinan Denmark dalam kebijakan iklim tetapi mengakui tantangan sosial-ekonomi dan teknis yang memerlukan kerangka kebijakan yang kuat, inovasi, dan kerja sama <i>stakeholders</i> untuk mencapai <i>net-zero emission</i> (Barker et al., 2022).</p>
10	<p>“Climate Translators” Building Trust and Local Democratic Cooperation on Green Transition: Denmark and Germany</p>	<p>Nicole Doerr & Janus Porsild Hansen (2024)</p>	<p><i>Climate translators:</i> Tulisan ini memperkenalkan “<i>climate translators</i>” atau “penerjemah iklim,” aktivis yang menjadi penengah antara warga negara dan</p>	<p>Mengeksplorasi peran aktivis iklim dalam membangun kepercayaan dalam perdebatan publik dan konflik mengenai transisi hijau di Denmark dan Jerman.</p> <p>Dalam konteks Denmark,</p>

			<p>otoritas negara untuk membangun kepercayaan dan mempromosikan kebijakan transisi hijau. Individu-individu ini bertindak sebagai perantara, menjembatani kesenjangan ideologis dan kelembagaan.</p> <p>Pendekatan komparatif: Analisis perbandingan Denmark dan Jerman menyoroti dampak konteks politik dan budaya pada strategi membangun kepercayaan, yang berkontribusi pada diskusi yang lebih luas</p>	<p>Penerjemah iklim tertanam secara kelembagaan, sering kali dipekerjakan oleh pemerintah kota. Mereka terlibat dalam pendekatan partisipatif yang didorong oleh konsensus, seperti majelis warga negara yang bersifat musyawarah, dan membina hubungan kerja sama antara masyarakat sipil dan negara. Sedangkan di Jerman, penerjemah iklim bekerja secara independen, sering kali di lingkungan yang kontroversial.</p> <p>Di Denmark, penerjemah iklim sering menghadapi keterbatasan karena kendala kelembagaan, sementara di Jerman, para aktivis berjuang dengan pendanaan yang tidak</p>
--	--	--	---	---

			<p>tentang interaksi antara masyarakat sipil dan aktor negara.</p>	<p>mencukupi, polarisasi ideologis, dan perlawanan dari otoritas setempat.</p> <p>Perdebatan utama berpusat pada efektivitas aktivis yang beroperasi dalam struktur negara <i>versus</i> mereka yang bekerja secara independen. Sementara penerjemah yang disematkan mungkin menikmati legitimasi yang lebih besar, aktivis independen memiliki lebih banyak kebebasan untuk menantang kepentingan yang mengakar (Doerr & Porsild Hansen, 2024).</p>
11.	<p>Climate Mitigation Policy in Denmark: A Prototype for</p>	<p>Nicoletta Batini, Ian W.H. Parry, & Philippe Wingender (2020)</p>	<p><i>Carbon Pricing:</i> Teori ekonomi mendukung penetapan harga karbon sebagai mekanisme yang</p>	<p>Tulisan ini mengeksplorasi strategi mitigasi iklim ambisius Denmark dan potensinya untuk menjadi prototipe</p>

	Other Countries		<p>efisien untuk menginternalisasi biaya sosial emisi. Teori ini memberikan insentif bagi seluruh perekonomian untuk mengurangi emisi dan berinvestasi dalam teknologi yang lebih bersih.</p> <p><i>Revenue-Neutral Feebates:</i> Konsep feebates sejalan dengan prinsip berbasis pasar, yang menawarkan pengurangan emisi yang hemat biaya tanpa menimbulkan beban fiskal tambahan.</p>	<p>bagi negara lain. Sasaran ambisius Denmark dalam mengurangi emisi gas rumah kaca memerlukan pendekatan multi-aspek yang melibatkan penetapan harga karbon, langkah-langkah khusus sektor, dan investasi dalam energi terbarukan.</p> <p>Strategi mitigasi iklim Denmark menggabungkan penetapan harga karbon yang agresif, kebijakan khusus sektor seperti <i>feebates</i>, dan investasi signifikan dalam energi terbarukan untuk mencapai target ambisiusnya yaitu pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 70% pada tahun 2030 dan emisi</p>
--	-----------------	--	--	--

				nol bersih pada tahun 2050. (Batini et al., 2020).
12	Drivers of Political Parties' Climate Policy Preferences: Lessons from Denmark and Ireland	Robert Ladrech & Conor Little (2019)	Spektrum politik kiri-kanan: Tulisam ini menempatkan preferensi kebijakan iklim dalam kerangka ideologis kiri-kanan tradisional, di mana partai kiri umumnya selaras dengan intervensi negara dan tindakan kolektif, dan partai kanan memprioritaskan efisiensi pasar dan daya saing ekonomi. <i>Multilateralism</i> dan <i>Compliance</i> : Peran perjanjian multilateral (kebijakan iklim Uni Eropa dan kerangka kerja	Artikel ini mengkaji pendorong preferensi kebijakan iklim partai politik di Denmark dan Irlandia, dengan fokus pada opini publik, persaingan partai, dan preferensi kebijakan yang ada. Meningkatnya perhatian publik dapat meningkatkan pentingnya isu iklim bagi partai-partai <i>mainstream</i> . Namun, rendahnya perhatian publik di Irlandia bertindak sebagai kendala, sementara perhatian yang lebih tinggi di Denmark memfasilitasi sikap kebijakan iklim yang lebih kuat. Persaingan di antara partai-partai <i>mainstream</i> dan pemilik isu seperti partai Hijau sering

			<p>UNFCCC) dalam memengaruhi preferensi partai</p> <p>Analisi ini juga terkait dengan konstruktivisme dengan mengeksplorasi bagaimana norma, identitas, dan persepsi membentuk preferensi partai politik.</p>	<p>kali membentuk kebijakan iklim. Di Denmark, partai-partai kiri-tengah mendorong agenda iklim yang ambisius, terkadang mendorong partai-partai kanan-tengah untuk mengadopsi sikap yang lebih hijau. Irlandia menunjukkan persaingan partai yang kurang jelas pada kebijakan iklim. (Ladrech & Little, 2019).</p>
13	<p>A Climate Backlash: Comparing Populist Parties' Climate Policies in Denmark, Finland, and Sweden</p>	<p>Antto Vihma, Gunilla Reischl, & Astrid Nonbo Andersen (2021)</p>	<p>Populisme sebagai Kerangka Strategis: Artikel ini mendefinisikan populisme sebagai "toolbox" yang digunakan oleh gerakan politik untuk menantang kaum elit dan memposisikan diri mereka</p>	<p>Jurnal ini menganalisis bagaimana partai-partai populis di negara-negara Nordik menyusun dan menerapkan kebijakan iklim. penulis memperkenalkan kerangka kerja analitis dengan tiga tipe ideal oposisi terhadap kebijakan iklim yang ambisius:</p>

			<p>sebagai suara "<i>common people</i>".</p> <p>Tipe-tipe ideal <i>climate oppositions</i>:</p> <p><i>Climate science denialism</i>:</p> <p>Mempertanyakan validitas ilmu iklim.</p> <p><i>Climate policy nationalism</i>:</p> <p>Menentang kerja-sama internasional dan menekankan kedaulatan nasional.</p> <p><i>Climate policy conservatism</i>:</p> <p>Menerima ilmu iklim tetapi menganjurkan kebijakan yang berbiaya minimal dan konservatif secara ekonomi.</p>	<p><i>climate science denialism, climate policy nationalism, and climate policy conservatism</i>. Penulis menggunakan studi kasus <i>Danish People's Party (DF)</i>, <i>the Finns Party (PS)</i>, dan <i>the Sweden Democrats (SD)</i> untuk mengeksplorasi strategi dan retorika mereka selama pemilihan umum.</p> <p>Partai-partai populis mulai menjauh dari <i>climate science denialism</i> secara langsung, tetapi terus membingkai isu-isu iklim dengan cara yang selaras dengan agenda populis mereka, dengan menekankan nasionalisme dan konservatisme ekonomi. <i>Climate denialism</i> telah berkembang menjadi</p>
--	--	--	--	--

				<p>kritik yang lebih halus, yang sering kali mempertanyakan biaya atau efektivitas kebijakan.</p> <p>Di Denmark, <i>Danish People's Party</i> (DF) mengalami transisi signifikan dalam pendiriannya terhadap kebijakan iklim, bergeser dari ketidakpedulian dan penolakan awal menjadi mengadopsi posisi yang lebih moderat setelah pemilu 2019. Secara historis mengabaikan perubahan iklim, DF menghadapi kritik publik dan media yang meningkat karena kurangnya kebijakan iklim yang koheren selama pemilu yang didominasi oleh masalah lingkungan. Hal ini berkontribusi pada kekalahan</p>
--	--	--	--	--

				<p>elektoral yang bersejarah, dengan partai tersebut kehilangan 21 dari 37 kursi parlemennya. Pasca pemilu, DF memperkenalkan dokumen iklim baru yang menekankan inovasi teknologi, peluang ekonomi dari ekspor hijau, dan kebijakan yang meminimalkan biaya bagi kelompok berpenghasilan rendah, seperti menentang pajak daging dan penerbangan. Partai tersebut membingkai aksi iklim sebagai masalah kebanggaan nasional dan tanggung jawab moral sambil menyeimbangkan narasi populisnya dengan "<i>climate hysteria</i>". (Vihma et al., 2021).</p>
--	--	--	--	--

14	The Developmentalisation of Climate Mobilities Policy in Denmark and Sweden	Sarah Louise Nash (2024)	<p>Developmentalisasi: Mobilitas iklim dibingkai sebagai isu pembangunan, yang menghubungkan dampak perubahan iklim dengan strategi kerja sama pembangunan internasional, khususnya dalam mencegah perpindahan dan migrasi tidak teratur.</p> <p>Sekuritisasi: Migrasi akibat perubahan iklim dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional, yang memperkuat kebijakan restriktif dan</p>	<p>Tulisan ini melihat bagaimana perubahan iklim dan mobilitas manusia telah diintegrasikan ke dalam kebijakan pembangunan internasional di Denmark dan Swedia. Studi ini mengkritisi pendekatan "developmentalisation", di mana migrasi dan perpindahan yang disebabkan oleh perubahan iklim dipandang terutama melalui lensa kerja sama pembangunan. Kerangka kerja ini menghubungkan adaptasi iklim dengan pencegahan migrasi, dengan menekankan kebijakan yang mencegah migrasi tidak teratur ke Eropa daripada mengatasi akar penyebab mobilitas atau memberikan dukungan yang</p>
----	---	--------------------------	---	---

			<p>langkah-langkah pengendalian migrasi.</p> <p><i>Climate Justice:</i></p> <p>Aktor masyarakat sipil menekankan dimensi etika pendanaan adaptasi iklim, mendesak kontribusi finansial yang lebih besar dari negara-negara kaya untuk mendukung masyarakat rentan di belahan bumi selatan.</p> <p><i>Neoliberal Governance:</i></p> <p>Ketergantungan pada ketahanan individu dan komunitas mengalihkan tanggung jawab dari solusi sistemik,</p>	<p>memadai bagi populasi yang terkena dampak.</p> <p>Tulisan ini menemukan bahwa baik Denmark maupun Swedia menggunakan narasi yang disekuritisasi, yang memposisikan migrasi yang disebabkan oleh iklim sebagai ancaman potensial terhadap stabilitas internasional dan keamanan nasional. Kebijakan Denmark secara eksplisit menghubungkan dampak perubahan iklim dengan migrasi tidak teratur dan membingkai kerja sama pembangunan sebagai alat untuk mencegah perpindahan. Demikian pula, strategi Swedia telah bergeser di bawah</p>
--	--	--	--	--

			menanamkan kebijakan adaptasi iklim dalam kerangka kerja yang digerakkan pasar.	pemerintahan yang condong ke kanan untuk menekankan pencegahan migrasi, mengurangi dukungan untuk langkah-langkah adaptasi iklim proaktif, dan menghapus perlindungan bagi individu yang terlantar karena lingkungan. (Nash, 2024).
15	Danish Experience in Combating Climate Change through Public-Private Partnerships: Implications for Ukraine	Igor Guzhva, Yevhen Ivanov, & Ruslan Illichov (2023)	<i>Public-Private Partnership (PPP)</i> : Ditekankan sebagai model untuk memanfaatkan kekuatan sektor publik dan swasta guna mencapai tujuan lingkungan secara efisien. Berfokus pada keseimbangan ambisi transisi hijau dengan	Jurnal ini menggarisbawahi kebijakan iklim Denmark yang patut dicontoh dan penerapannya di Ukraina. Jurnal ini menganjurkan penerapan kemitraan iklim sektoral untuk mempercepat transisi hijau Ukraina, dengan menekankan penciptaan bersama, inovasi, dan keterlibatan pemangku

			<p>daya saing ekonomi.</p> <p><i>Green Transition:</i></p> <p>Pergeseran menuju ekonomi rendah karbon, yang melibatkan penyesuaian teknologi, regulasi, dan ekonomi.</p> <p>Mempromosikan energi terbarukan, efisiensi energi, dan praktik berkelanjutan dalam berbagai industri.</p> <p><i>Stakeholder Engagement and Co-Creation:</i></p> <p>Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan (bisnis, pemerintah, masyarakat sipil)</p>	<p>kepentingan secara aktif. Transformasi ini penting untuk memenuhi komitmen iklim internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.</p> <p>Keberhasilan Denmark dalam memerangi perubahan iklim didukung oleh model PPP yang kuat serta mendorong kolaborasi antara pemerintah dan entitas swasta. <i>Danish Climate Act (2020)</i> mengamankan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 70% pada tahun 2030 dan emisi nol bersih pada tahun 2050. Kemitraan iklim dibentuk di 14 sektor utama, yang melibatkan para pemimpin industri dan perwakilan</p>
--	--	--	--	---

			<p>memastikan solusi yang inklusif dan praktis untuk tantangan iklim.</p>	<p>pemerintah untuk mengembangkan peta jalan khusus sektor untuk dekarbonisasi.</p> <p>Implikasi untuk Ukraina: Pendekatan Ukraina saat ini terhadap kebijakan iklim sangat bergantung pada inisiatif yang dipimpin pemerintah dengan keterlibatan sektor swasta yang minimal, yang menyebabkan skeptisisme dan keterlambatan dalam mencapai target iklim. Rekomendasi dibuat untuk mengadopsi <i>danish-style climate platform</i> yang dipimpin oleh <i>Federation of Employers of Ukraine</i> (FEU) untuk mendorong kolaborasi antara pemerintah, bisnis, dan para ahli.</p>
--	--	--	---	---

				Platform ini bertujuan untuk mengintegrasikan kemitraan sektoral, meningkatkan transparansi, dan mendukung transisi hijau melalui rencana aksi terstruktur (Guzhva et al., 2023).
16	The Power of Presidency in UN Climate Change Negotiations: Comparison between Denmark and Mexico	Siwon Park (2015)	<p><i>Structural leadership:</i> Menggunakan sumber daya material atau kekuasaan untuk memengaruhi hasil.</p> <p><i>Directional leadership:</i> Menunjukkan komitmen melalui tindakan domestik.</p> <p><i>Idea-based leadership:</i> Menggunakan keahlian teknis, menghubungkan isu, dan</p>	Dokumen ini membandingkan efektivitas kepemimpinan Denmark dan Meksiko dalam memimpin UN Climate Change Conferences of Parties atau COP (COP15 di Kopenhagen, 2009, dan COP16 di Cancun, 2010). Penulis menyoroti bagaimana gaya kepemimpinan, strategi, dan pendekatan kelembagaan memengaruhi hasil negosiasi. Sementara

			<p>membangun koalisi untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama.</p> <p><i>Historical Institutionalism :</i></p> <p>Menjelaskan bagaimana aturan, norma, dan pengalaman historis kelembagaan membentuk hasil negosiasi. Jurnal ini kemudian berpendapat bahwa pelajaran prosedural dari COP15 memengaruhi pendekatan Meksiko dalam COP16.</p>	<p>COP15 berakhir dengan kegagalan untuk mengadopsi perjanjian yang mengikat secara hukum, COP16 dipuji sebagai keberhasilan, yang berpuncak pada <i>Cancun Agreements</i>.</p> <p>Kedua kepemimpinan negara tersebut pada COP beroperasi berdasarkan proses pengambilan keputusan konsensus UNFCCC. Akan tetapi, Denmark berpegang teguh pada suara bulat, sementara Meksiko menafsirkan konsensus sebagai kesepakatan luas tanpa hak veto, yang memungkinkan kemajuan meskipun ada pertentangan (Park, 2016).</p>
17	From Competition State to Green	Asker Voldsgaard, Mariana Mazzucato,	<i>Green Entrepreneurial State:</i> Terinspirasi oleh	Tulisan ini mengkaji transisi Denmark dari <i>Competition State</i> , yang berfokus pada

	<p>Entrepreneurial State: New Challenges for Denmark</p>	<p>& Rowan Conway (2022)</p>	<p>karya Mariana Mazzucato, model ini menekankan inovasi sistemik dan dekarbonisasi sebagai tujuan utama negara, yang kontras dengan pendekatan pengaturan pasar dari <i>Competition State</i>.</p> <p>ROAR <i>Framework</i>: Analisis ini menerapkan kerangka kerja ROAR (<i>Routes, Organizations, Assessment tools, and Risks/Rewards</i>) untuk mengevaluasi transisi Denmark. Analisis ini mengidentifikasi</p>	<p>daya saing ekonomi global, menjadi <i>Green Entrepreneurial State</i>, yang menempatkan dekarbonisasi dan keberlanjutan sistemik di pusat pembuatan kebijakan. Dilandasi oleh Danish Climate Act tahun 2020, penulis menyoroti pergeseran kelembagaan dan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai target iklim yang ambisius, termasuk pengurangan emisi yang mengikat secara hukum sebesar 70% pada tahun 2030 dan <i>net-zero emission</i> pada tahun 2050.</p> <p>Denmark telah membuat langkah signifikan dengan Undang-Undang Iklim dan target dekarbonisasi, yang menandakan</p>
--	--	----------------------------------	--	--

			<p>kesenjangan dalam kejelasan misi, koordinasi organisasi, evaluasi kebijakan, dan mekanisme pembagian risiko.</p>	<p>pergeseran menuju <i>Green Entrepreneurial State</i>. Namun, sistem lama, tata kelola yang terfragmentasi, dan pendanaan inovasi yang tidak memadai tetap menjadi hambatan untuk mencapai perubahan sistemik. Reformasi komprehensif, termasuk peningkatan kemampuan sektor publik, perangkat kebijakan terpadu, dan mekanisme investasi yang kuat, sangat penting untuk mencapai tujuan iklim Denmark yang ambisius (Voldsgaard et al., 2022).</p>
18	<p>Smart energy Denmark. A Consistent and Detailed Strategy for A Fully Decarbonized Society</p>	<p>Henrik Lund, Jakob Zinck Thellufsen, Peter Sorknæs, Brian Vad Mathiesen, Miguel</p>	<p><i>Smart Energy System:</i> Diperkenalkan pada tahun 2014, paradigma ini bergerak melampaui strategi energi</p>	<p>Jurnal ini menyajikan "<i>Smart Energy Denmark 2045</i>," sebuah strategi komprehensif untuk mengubah Denmark menjadi masyarakat yang sepenuhnya</p>

		<p>Chang, Poul Thøis Madsen, Mikkel Strunge Kany, & Iva Ridjan Skov (2022)</p>	<p>sektor tunggal dengan mengintegrasikan semua sektor terkait energi ke dalam satu sistem yang kohesif. Berfokus pada penggabungan sektor dan penyimpanan energi untuk fleksibilitas dan ketahanan.</p> <p><i>EnergyPLAN Modelling: Alat simulasi canggih untuk analisis sistem energi per jam, memastikan keandalan dan replikasi data. Memungkinkan perancangan sistem yang hemat biaya dan layak secara teknis dengan mengoptimalkan lintas sektor.</i></p>	<p>bebas karbon pada tahun 2045. Strategi ini mengintegrasikan sistem energi, transportasi, dan industri di bawah pendekatan Smart Energy Systems yang holistik, yang bertujuan untuk memenuhi target pengurangan karbon yang ambisius yang selaras dengan Undang-Undang Iklim Denmark (70% pada tahun 2030 dan net-zero emisi pada tahun 2045).</p> <p>Strategi "Smart Energy Denmark 2045" sangat ambisius, yang menunjukkan peran Denmark sebagai pemimpin global dalam energi berkelanjutan. Strategi ini menyediakan model yang dapat ditiru bagi</p>
--	--	--	---	--

				<p>negara lain untuk melakukan dekarbonisasi secara efektif sambil menyeimbangkan tantangan teknologi, ekonomi, dan sosial. Integrasi pemodelan tingkat lanjut dan kolaborasi lintas sektoral menetapkan jalur yang realistis untuk mencapai masyarakat tanpa emisi karbon pada pertengahan abad (Lund et al., 2022).</p>
19	<p>Energy System Transformation and Long-term Interest Constellations in Denmark: Can Agency Beat Structure?</p>	<p>Per Ove Eikeland & Tor Håkon J. Inderberg (2016)</p>	<p><i>Public Choice Theory:</i> Teori ini menjelaskan pergeseran kebijakan pertama sebagai cerminan prioritas pemerintah baru yang selaras dengan konstituen neoliberal. Pergeseran kedua</p>	<p>Jurnal ini membahas transisi Denmark dari sistem energi yang bergantung pada bahan bakar fosil ke lanskap energi yang berfokus pada energi terbarukan. Transformasi ini dianalisis melalui sudut pandang perubahan kebijakan pada awal tahun 2000-an, yang mencakup</p>

			<p>dipandang sebagai respons terhadap pertentangan tak terduga dari koalisi pemangku kepentingan yang luas, yang menggambarkan rasionalitas terbatas.</p> <p><i>Path Dependency Theory:</i></p> <p>Menekankan pentingnya komitmen historis terhadap kepemilikan lokal dan energi terbarukan, yang membentuk struktur sistem energi.</p> <p>Menyatakan bahwa penolakan terhadap reformasi neoliberal</p>	<p>penyimpangan kemajuan energi terbarukan di bawah agenda neoliberal dan pemulihan kebijakan tersebut selanjutnya.</p> <p>Dua perspektif teoritis diterapkan untuk mengkaji perubahan ini dan implikasinya terhadap tata kelola sistem energi Denmark (<i>Public Choice Theory and Path Dependency Theory</i>).</p> <p>Pergeseran kebijakan pertama (2001): Pemerintah neoliberal mengurangi subsidi, menghapus norma nirlaba, dan memusatkan kepemilikan sektor energi. Hal ini didorong oleh tuntutan dari konstituen bisnis yang mendukung deregulasi.</p>
--	--	--	---	--

			berakar pada norma-norma kelembagaan dan masyarakat yang mengakar yang mendukung desentralisasi dan keberlanjutan.	Pergeseran kebijakan kedua (2007-2008): Menanggapi reaksi keras dari konstituen tradisional dan tak terduga (misalnya, pemangku kepentingan industri dan lokal), kebijakan diberlakukan kembali untuk mendukung energi terbarukan dan desentralisasi (Eikeland & Inderberg, 2016).
20	Denmark's Phase-out of Upstream Oil and Gas: Effective Climate Policy or Symbolic Gesture?	Marshall Hall (2020)	<i>Symbolic Politics:</i> Keputusan yang ada dapat dipahami sebagai bentuk politik simbolik, yang dirancang untuk menunjukkan kepemimpinan dan menginspirasi tindakan global, bukan sekadar mencapai pengurangan emisi yang	Tulisan ini mengevaluasi keputusan Denmark untuk menghentikan produksi minyak dan gas pada tahun 2050, sebagai bagian dari strategi iklimnya yang ambisius. Penulis mengeksplorasi implikasi praktis dari keputusan ini dan mengkaji apakah keputusan ini merupakan kontribusi substansial terhadap tujuan iklim atau

			<p>signifikan secara langsung.</p> <p><i>Energy Transition Theory:</i></p> <p>Menyoroti peran kebijakan yang menghapus bahan bakar fosil dalam mempercepat transisi ke energi terbarukan dan mendorong inovasi dalam penyimpanan karbon dan teknologi terbarukan.</p>	<p>sekadar gerakan simbolis. Keputusan Denmark untuk menghentikan produksi minyak dan gas pada tahun 2050 bermula dari pergeseran politik setelah pemilu 2019, di mana pemerintah yang dipimpin oleh Demokrat Sosial yang didukung oleh partai-partai hijau dan sayap kiri memprioritaskan aksi iklim yang ambisius di bawah Undang-Undang Iklim 2019.</p> <p>Dampak lingkungan: Penghapusan bertahap dapat mengurangi emisi GRK tetapi akan berdampak terbatas pada total emisi global, karena Denmark hanya menyumbang sebagian kecil dari</p>
--	--	--	---	--

				<p>produksi minyak dan gas.</p> <p>Dampak ekonomi: Diperkirakan hilangnya pendapatan pemerintah (DKK 90 juta per tahun selama lima tahun) dan lapangan pekerjaan di sektor hulu. Namun, hal ini dapat mendorong investasi dalam infrastruktur energi bersih.</p> <p>Keputusan tersebut telah dirayakan oleh organisasi lingkungan sebagai tanda kepemimpinan tetapi dikritik karena tidak memiliki peta jalan yang jelas dan terukur untuk mengurangi emisi secara substansial. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah peran Denmark sebagai produsen minyak</p>
--	--	--	--	---

				<p>yang relatif kecil membatasi signifikansi global dari kebijakan ini. Keputusan Denmark mencerminkan tren di negara-negara Eropa lainnya seperti Prancis dan Irlandia, yang juga telah berjanji untuk menghentikan eksplorasi. Produsen yang lebih besar seperti Norwegia dan Inggris telah menolak kebijakan serupa, dengan menekankan kompatibilitas produksi yang berkelanjutan dengan dekarbonisasi (Hall, 2020).</p>
21	<p>Climate Change and the Future of Europe: Views from the Capitals</p>	<p>Michael Kaeding, Johannes Pollak, & Paul Schmidt (2023)</p>	<p><i>Regional Organization</i> (EU) termasuk kesepakatan dan tujuannya</p>	<p>Buku ini menganalisis upaya nasional negara anggota dan negara tetangga Uni Eropa untuk memerangi perubahan iklim. Buku ini mengeksplorasi</p>

				<p>tujuan ambisius yang diuraikan dalam <i>Green Deal Uni Eropa</i> yang bertujuan menjadikan Eropa sebagai benua netral iklim pertama pada tahun 2050, implementasi nasional sangat bervariasi tergantung pada geografi, sejarah, budaya, ekonomi, dan politik setempat. Salah satu bagian dalam buku ini diberi sub-judul <i>Denmark: Climate as a Given</i> yang secara khusus membahas tentang Denmark di mana terdapat beberapa temuan menarik seperti bagaimana isu perubahan iklim bukanlah sesuatu yang dikontestasikan melainkan sebuah prioritas yang sudah seharusnya diatasi, bagaimana kebijakan</p>
--	--	--	--	---

				iklim Denmark diterima secara luas di berbagai partai politik dan masyarakat, yang mengarah pada dukungan publik yang kuat dan tindakan legislatif yang konsisten (Kaeding & Pollak, 2023).
22	Denmark: Small State with A Big Voice and Bigger Dilemmas	Mikael Skou Andersen & Helle Ørsted Nielsen (2016)	<i>Multi-Level and Polycentric Governance</i> (EU, UNFCCC, <i>Nordic Council</i>)	Tulisan ini mengeksplorasi peran Denmark dalam mengatasi perubahan iklim yang digambarkan melalui beberapa periode waktu mulai dari kebijakan iklim awal dan keamanan energi (1988–1993), penguatan kepemimpinan dalam agenda iklim (1993–2001), pendekatan dengan orientasi pasar dan pergeseran kebijakan (2001–2007), pertumbuhan hijau dan perluasan

				energi terbarukan (2007–2011), serta kebijakan Iklim di bawah kendala ekonomi (2011–2015) (Andersen & Nielsen, 2016). Tulisan ini juga mengkaji peran Denmark dalam politik iklim internasional serta tantangan dan dilema yang dihadapi.
--	--	--	--	---

Tabel 1.

Maka berdasarkan hasil tinjauan dari 22 literatur pembandingan tidak ada satupun literatur yang memiliki kesamaan murni dari segi teoritis, konsep maupun studi empiris.